KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Wakil Ketua DPR Sari Yuliati kunker ke Lombok, bantuan sanitasi dari negara perbaiki kualitas hidup rakyat
Tanggal : Selasa, 05 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Wakil Ketua DPR Sari Yuliati Kunker Ke Lombok

Bantuan Sanitasi Dari Negara Perbaiki Kualitas Hidup Rakyat

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sari Yuliati, melakukan kunjungan kerja ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (3/5/2026). Politisi Partai Golkar itu memberikan bantuan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dan irigasi persawahan kepada masyarakat.

SARI mengatakan, penyerahan bantuan Sanimas di Desa Batujai, Ungga, dan Tanak Awuk, Lombok, menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada infrastruktur besar, tapi juga menyentuh kebutuhan paling dasar masyarakat, seperti akses sanitasi yang layak.

Menurut dia, program Sanimas yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagera (APBN) merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses sanitasi.

"Sanitasi bukan sekadar soal kebersihan. Ini menyangkut kesehatan, produktivitas, dan masa depan generasi kita. Tanpa sanitasi yang layak, risiko penyakit meningkat, dan beban ekonomi masyarakat ikut bertambah," ujarnya.

Lebih lanjut, Sari menyoroti banyaknya daerah yang menghadapi persoalan klasik, seperti minimnya fasilitas sanitasi, serta rendahnya kesadaran tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Sebab itu, dia meminta, program Sanimas tidak dipandang sebagai proyek biasa, tapi intervensi strategis untuk memutus rantai masalah kesehatan dan kemiskinan.

Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar itu juga meminta penggunaan APBN dikawal secara serius, agar tepat sasaran dan tidak berhenti pada pembangunan fisik. Sari menegaskan, keberhasilan program Sanimas bergantung pada keterlibatan masyarakat, utamanya dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas yang telah dibangun.

"Jangan sampai, fasilitas sudah dibangun dengan anggaran negara, tidak dimanfaatkan atau tidak dirawat. Ini tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah," tegasnya.

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Barat II itu juga mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan kelompok masyarakat, memastikan keberlanjutan program melalui edukasi dan penguatan kesadaran kolektif. Dengan sanitasi yang baik, harap dia, angka penyakit berbasis lingkungan bisa ditekan agar masyarakat bisa hidup lebih sehat dan produktif.

"Penyerahan bantuan Sanimas ini menjadi pengingat, efektivitas APBN tak hanya diukur dari besarnya angka yang digelontorkan, tapi dampaknya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara nyata. Hal itu dimulai dari hal paling mendasar, yakni sanitasi yang layak bagi semua," jelasnya.

Irigasi Pertanian Investasi Strategis Perekonomian Rakyat

Selain memberi bantuan Sanimas, Sari juga menyerahkan bantuan irigasi persawahan di Desa Penujak, Praya Barat, Lombok. Menurut dia, bantuan tersebut merupakan upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus menegaskan keberpihakan negara kepada petani.

Sari menegaskan, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi bukan sekedar proyek fisik, tapi investasi strategis yang menyentuh langsung urat nadi perekonomian rakyat. Sebab itu, alokasi APBN untuk sektor pertanian harus dipastikan tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi peningkatan produktivitas petani.

"Bantuan irigasi bukan hanya soal mengalirkan air ke sawah. Ini bagian dari upaya untuk memastikan para petani tidak bergantung pada musim, dan mampu meningkatkan hasil panen secara berkelanjutan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sari juga menguraikan sejumlah persoalan klasik di sektor pertanian. Di antaranya, distribusi air yang tidak merata, infrastruktur irigasi yang rusak, hingga minimnya perawatan.

Dia memastikan, DPR RI akan terus mengawal penggunaan anggaran negara, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Karenanya, pinta Sari, program yang bersumber dari APBN diiringi dengan pengawasan ketat dan partisipasi aktif masyarakat.

"Tanpa itu, potensi kebocoran anggaran dan proyek mangkrak akan terus menghantui pembangunan sektor pertanian. Sekarang, negara sudah hadir. Ke depan, dibutuhkan komitmen bersama dari Pemerintah Daerah, kelompok tani, serta masyarakat, untuk menjaga dan memanfaatkan secara optimal," tegasnya.

Lebih lanjut, Sari berharap, bantuan irigasi yang diberikan pihaknya bisa mendorong peningkatan indeks pertanian di wilayah Praya Barat. "Petani harus lebih produktif. Dengan demikian, kesejahteraan meningkat dan ketahanan pangan daerah semakin kuat," tandasnya. ■ TIM/ONI